

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### 6.1 Kesimpulan

IRA yang disahkan pada Agustus 2022 bukan sekadar kebijakan iklim. Ia merupakan instrumen *economic statecraft* yang dirancang Amerika Serikat untuk mengurangi dominasi Tiongkok dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Melalui dua mekanisme utamanya, yaitu persyaratan konten lokal (*local content requirement/LCR*) dan ketentuan FEOC, IRA secara efektif menutup akses perusahaan-perusahaan baterai Tiongkok dari insentif pasar Amerika Serikat. Persyaratan bahwa komponen baterai harus diproduksi di Amerika Utara dengan persentase yang terus meningkat, dan larangan kredit pajak bagi kendaraan yang mengandung komponen dari entitas yang terhubung dengan pemerintah Tiongkok, menjadikan IRA sebagai bentuk proteksionisme hijau yang membalut tujuan geopolitik dalam narasi transisi energi. Dampaknya bagi Tiongkok sangat nyata, rencana investasi perusahaan seperti CATL dan Gotion High-Tech di Amerika Serikat terhenti atau dibatalkan, sementara dominasi mereka atas rantai pasok baterai global mulai dipertanyakan oleh pasar-pasar besar lainnya yang mulai mengikuti pola proteksionisme serupa.

Namun Tiongkok tidak merespons secara pasif. Dalam kerangka teori *economic statecraft* Baldwin (2020) dan konsep *economic lawfare* Ferguson (2022), penelitian ini mengidentifikasi bahwa Tiongkok menggunakan kombinasi dua jenis instrumen secara bersamaan yaitu instrumen non-legal dan instrumen legal. Kombinasi ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari kalkulasi strategis bahwa tidak ada satu jalur tunggal yang cukup untuk menghadapi tantangan yang diciptakan IRA secara menyeluruh.

Respons non-legal Tiongkok diwujudkan terutama melalui strategi *origin shifting*, yaitu menggeser atau merestrukturisasi lokasi produksi agar produk yang dihasilkan tidak lagi terkategori berasal dari entitas FEOC. Investasi besar CATL senilai €7,3 miliar di Hungaria dirancang untuk memperoleh status produk buatan Eropa sehingga dapat mengakses pasar Eropa tanpa hambatan tarif.

Sementara itu, gelombang investasi perusahaan-perusahaan baterai Tiongkok ke Maroko, mulai dari BTR, Huayou Cobalt, hingga Gotion High-Tech, memanfaatkan status Perjanjian Perdagangan Bebas / *Free Trade Agreement* (FTA) Maroko dengan Amerika Serikat agar komponen yang diproduksi di sana berpotensi memenuhi syarat kredit pajak IRA. Ekspansi ke kawasan ASEAN, khususnya Indonesia dan Malaysia, juga dilakukan untuk mengamankan akses ke bahan baku nikel sekaligus menjangkau pasar-pasar berkembang yang tumbuh cepat. Keseluruhan pola ini menunjukkan bahwa *origin shifting* adalah strategi adaptasi pragmatis yang bekerja di luar jalur hukum formal, namun tetap dijalankan secara terkoordinasi dan terkalkulasi sebagai *countermeasure* terhadap tekanan proteksionisme AS. Meski demikian, strategi ini tidak bebas risiko karena pemerintah AS terus memperluas definisi FEOC untuk menutup celah yang muncul, sebagaimana terbukti dari pengklasifikasian BTR beserta anak perusahaannya di luar negeri sebagai FEOC pada Januari 2025.

Di sisi instrumen legal, Tiongkok mengajukan gugatan resmi ke WTO pada Maret 2024 melalui kasus DS623, menuntut bahwa kredit pajak kendaraan listrik dan energi terbarukan dalam IRA melanggar sejumlah perjanjian dasar WTO, termasuk prinsip *national treatment* dalam GATT, larangan subsidi terhadap penggunaan produk domestik dalam SCM Agreement, serta larangan persyaratan investasi terkait konten lokal dalam *TRIMs Agreement*. Pada Januari 2026, panel WTO memutuskan bahwa kredit pajak energi terbarukan dalam IRA memang melanggar GATT, TRIMs, dan SCM Agreement, memberikan validasi hukum internasional atas posisi Tiongkok. Meskipun keterbatasan struktural WTO, khususnya lumpuhnya *Appellate Body* akibat pemblokiran AS, membuat putusan ini sulit dieksekusi secara langsung, nilai strategis dari gugatan ini jauh melampaui aspek teknis hukumnya. Tiongkok berhasil membangun citra sebagai pembela sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, memperlemah legitimasi IRA di mata komunitas internasional, sekaligus menarik 25 pihak ketiga untuk mendaftarkan kepentingan mereka dalam kasus tersebut.

Secara keseluruhan, respons Tiongkok terhadap IRA menggambarkan karakteristik negara dengan tingkat *stateness* yang tinggi sebagaimana

dikonseptualisasikan Blanchard dan Ripsman (2008), memiliki otonomi pengambilan kebijakan yang kuat, kapasitas industri dan investasi yang besar, serta legitimasi politik yang memungkinkan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta. Alih-alih menyesuaikan diri dengan tekanan AS, Tiongkok memilih untuk mempertahankan kepentingan strategisnya melalui adaptasi struktural di satu sisi dan perlawanan normatif di sisi lain. Kombinasi kedua instrumen ini bersifat komplementer, *origin shifting* melindungi pendapatan dan posisi bisnis dalam jangka pendek, sementara gugatan WTO membangun legitimasi dan tekanan normatif dalam jangka panjang. Inilah yang menjadi temuan utama penelitian ini bahwa dalam menghadapi *economic statecraft* yang dilakukan Amerika Serikat melalui IRA, Tiongkok juga merespons dengan *economic statecraft*, menggunakan baik instrumen legal maupun non-legal secara simultan sesuai kerangka yang dibangun Ferguson (2022).

## **6.2. Saran**

### **6.2.1 Saran Akademis**

Penelitian ini masih berfokus pada periode awal implementasi IRA, yaitu 2022–2025, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengkaji perkembangan jangka panjang kebijakan tersebut terhadap restrukturisasi rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas analisis dengan membandingkan respons Tiongkok terhadap berbagai bentuk proteksionisme hijau yang diterapkan oleh negara lain, seperti Uni Eropa melalui *Critical Raw Materials Act* dan *Net-Zero Industry Act*. Kajian yang lebih luas juga dapat mengombinasikan pendekatan *economic statecraft*, *economic lawfare*, dan teori rantai pasok global (*global value chains*) agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika persaingan ekonomi dan teknologi dalam era transisi energi.

### **6.2.2 Saran Praktis**

Bagi para pembuat kebijakan, penelitian ini menunjukkan pentingnya membangun ketahanan rantai pasok dan mengurangi ketergantungan yang

berlebihan terhadap satu negara atau satu wilayah produksi. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok memperlihatkan bahwa sektor teknologi hijau tidak lagi hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh pertimbangan geopolitik dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu menerapkan strategi diversifikasi pasar, memperkuat kapasitas industri domestik, serta memanfaatkan kerjasama internasional secara lebih aktif agar tidak rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi negara-negara besar. Langkah tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan industri kendaraan listrik dan menjaga posisi negara dalam rantai pasok global yang semakin kompetitif.